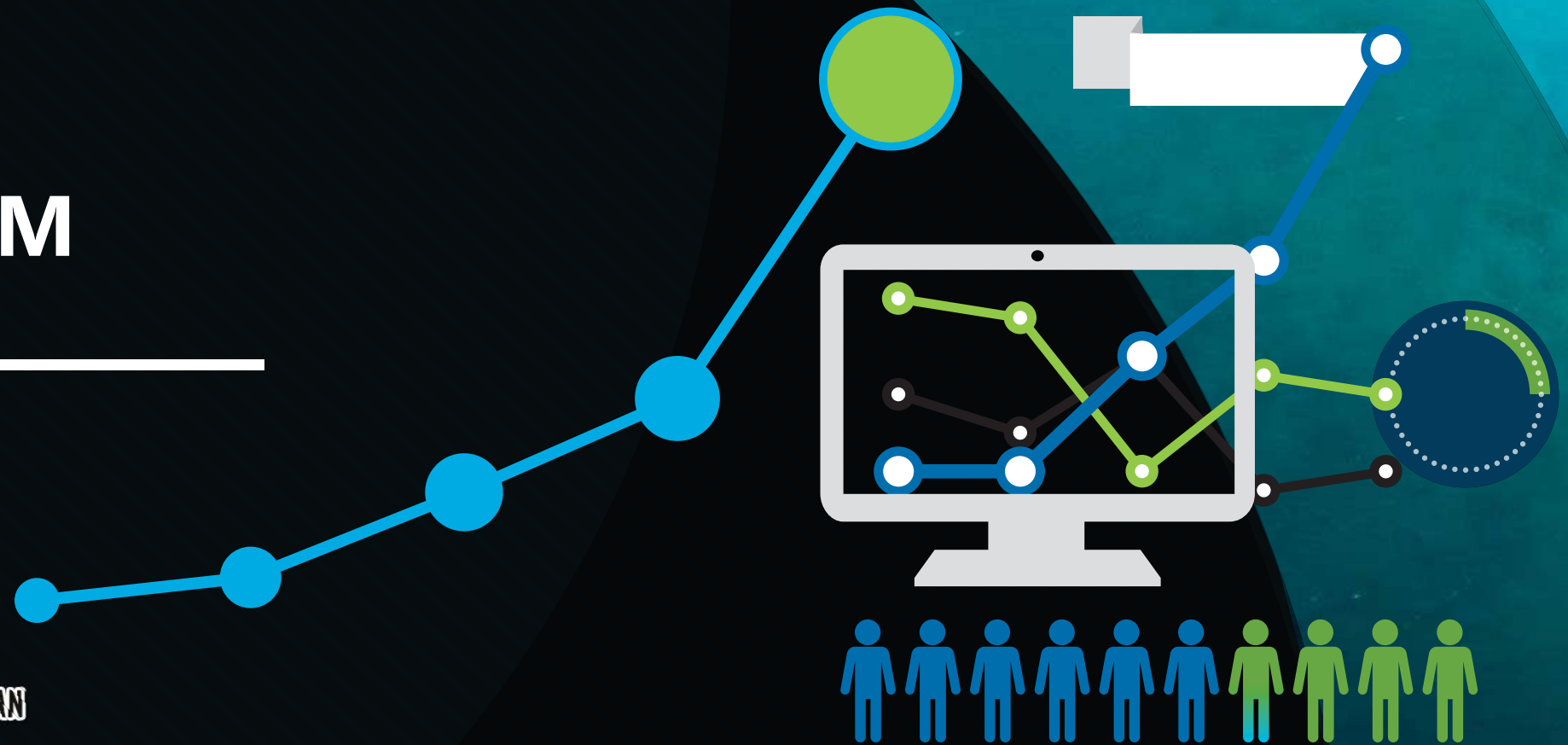




STATISTIK SEKRETARIAT BADAN P2SDM TAHUN 2019



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



Dokumen ini dapat diunduh
pada Tautan :



<https://bit.ly/statistiksekretariatbadanp2sdmtahun2019>



[@http://bp2sdm.menlhk.go.id](http://bp2sdm.menlhk.go.id)



[@Bp2sdm_lhk](#)



[@bp2sdmlhk](#)



[@BP2SDM LHK](#)



PENGANTAR

SEKRETARIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Dalam era keterbukaan informasi, tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data statistik yang semakin beragam dan berkualitas (lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan) semakin hari juga semakin meningkat. Tak terkecuali data statistik tentang penyuluhan dan pengembangan SDM. Data statistik merupakan faktor penting dalam proses manajemen, karena merupakan pendukung atau supporting fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Data statistik perlu dikelola, diolah, dikemas dan disebarluaskan kepada para pengguna, baik eksternal maupun lingkungan internal.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, informasi disusun secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha, mulai tingkat nasional sampai tingkat tapak. Sejalan dengan data statistik KLHK dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Badan P2SDM), statistik Sekretariat Badan P2SDM disusun dengan bersumber pada data pada masing-masing bagian lingkup Sekretariat Badan P2SDM.

Data statistik yang telah disusun, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi akurat dan terkini serta menjadi satu pintu sumber data bagi pihak, baik eksternal maupun internal dalam mewujudkan perencanaan bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis data.

Jakarta, April 2020
Sekretaris Badan,



Ir. Sudayatha, M.Sc
NIP.19600610 198703 1 001



01

BAB I PENDAHULUAN

1

02

BAB II PROGRAM DAN KERJASAMA

3

03

BAB III INFORMASI PUBLIKASI DAN EVALUASI

12

04

BAB IV KEPEGAWAIAN, HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA

25

05

BAB V KEUANGAN DAN UMUM

41

BAB I PENDAHULUAN



Sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya interaksi internasional sebagai bagian dari aspek globalisasi, maka terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tuntutan dalam administrasi publik dewasa ini. Penyelenggaraan good governance mensyaratkan kinerja birokrasi yang memiliki daya saing tinggi yang diwujudkan dalam kerangka Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Tidak terkecuali kinerja unit organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Badan P2SDM) sebagai Unit Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Indikator Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola pada Kementerian LHK, maka di tiap unit Eselon I Kementerian LHK, diselenggarakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Mengacu tugas dan fungsi unit kerja Badan P2SDM sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II-2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dilaksanakan oleh Sekretariat Badan P2SDM.

Sebagai salah satu unit kerja Eselon II Badan P2SDM, eksistensi Sekretariat Badan P2SDM dituntut dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka pelaksanaan tugas koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkup satuan kerja unit organisasi Badan P2SDM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Badan P2SDM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pelayanan administrasi di lingkungan Badan P2SDM.

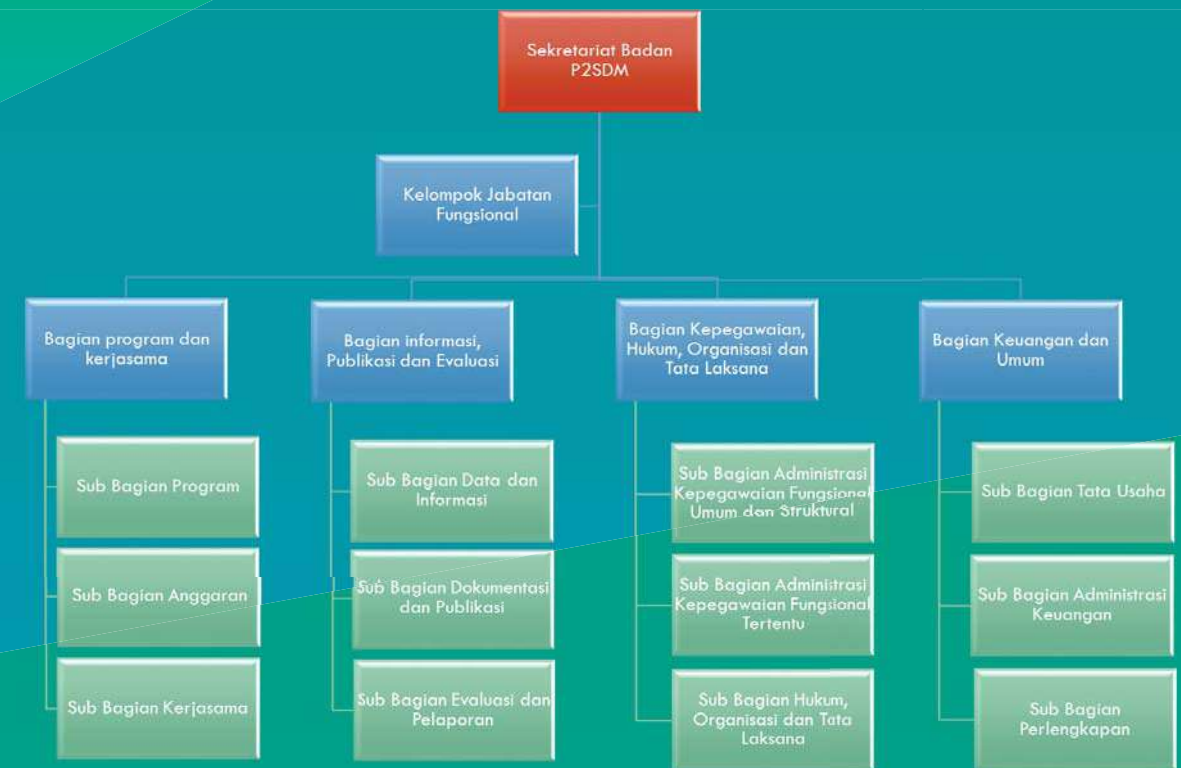
Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Badan P2SDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama;
- 2) Koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran;

- 3) Koordinasi dan pengelolaan data, informasi, dokumentasi dan publikasi hasil penyuluhan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Struktur kelembagaan Sekretariat Badan P2SDM terdiri atas empat bagian, yaitu :

- 1) Bagian Program dan Kerja Sama.
- 2) Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi.
- 3) Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana.
- 4) Bagian Keuangan dan Umum.



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan P2SDM



BAB II PROGRAM DAN KERJASAMA

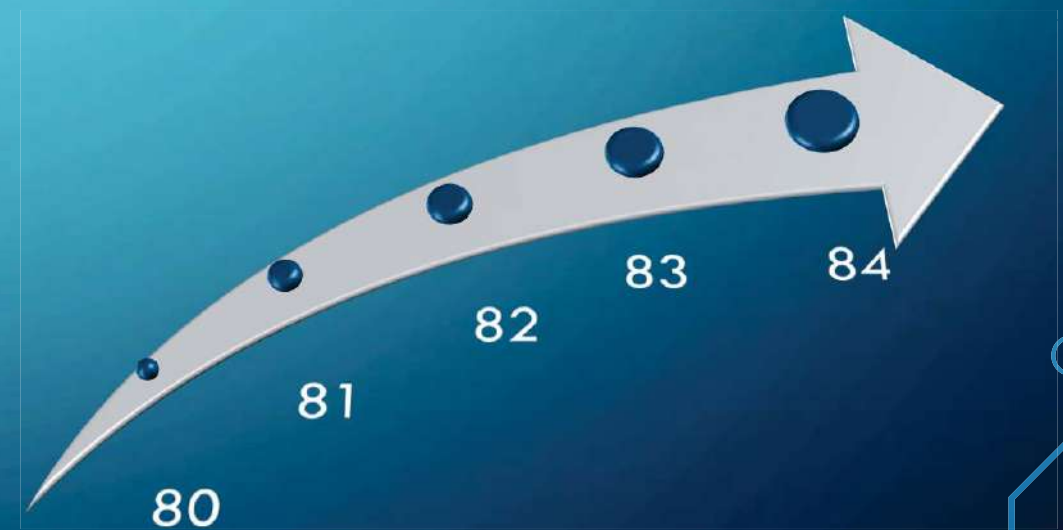
Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan persiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta administrasi kerjasama di lingkungan Badan.

Data lingkup Bagian Program dan Kerjasama yang ditampilkan statistik ini adalah Target Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM, Anggaran Sekretariat Badan P2SDM menurut sumber dana, Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Per Belanja, Tren rencana Penarikan anggaran, jumlah revisi anggaran Sekretariat Badan P2SDM, Daftar Kerjasama Dalam Negeri Lingkup Badan P2SDM serta Daftar Kerjasama Luar Negeri Lingkup Badan P2SDM.

Target Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan P2SDM DAN Kementerian LHK serta disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Target Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019



Gambar 2. Target Rencana Kerja Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Kegiatan Sekretariat Badan P2SDM dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sumber dana APBN dalam DIPA Sekretariat Badan P2SDM terdiri atas dua sumber yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Anggaran Sekretariat Badan Tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan Sumberdana dan per belanja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1 Anggaran Sekretariat Badan P2SDM menurut sumber dana

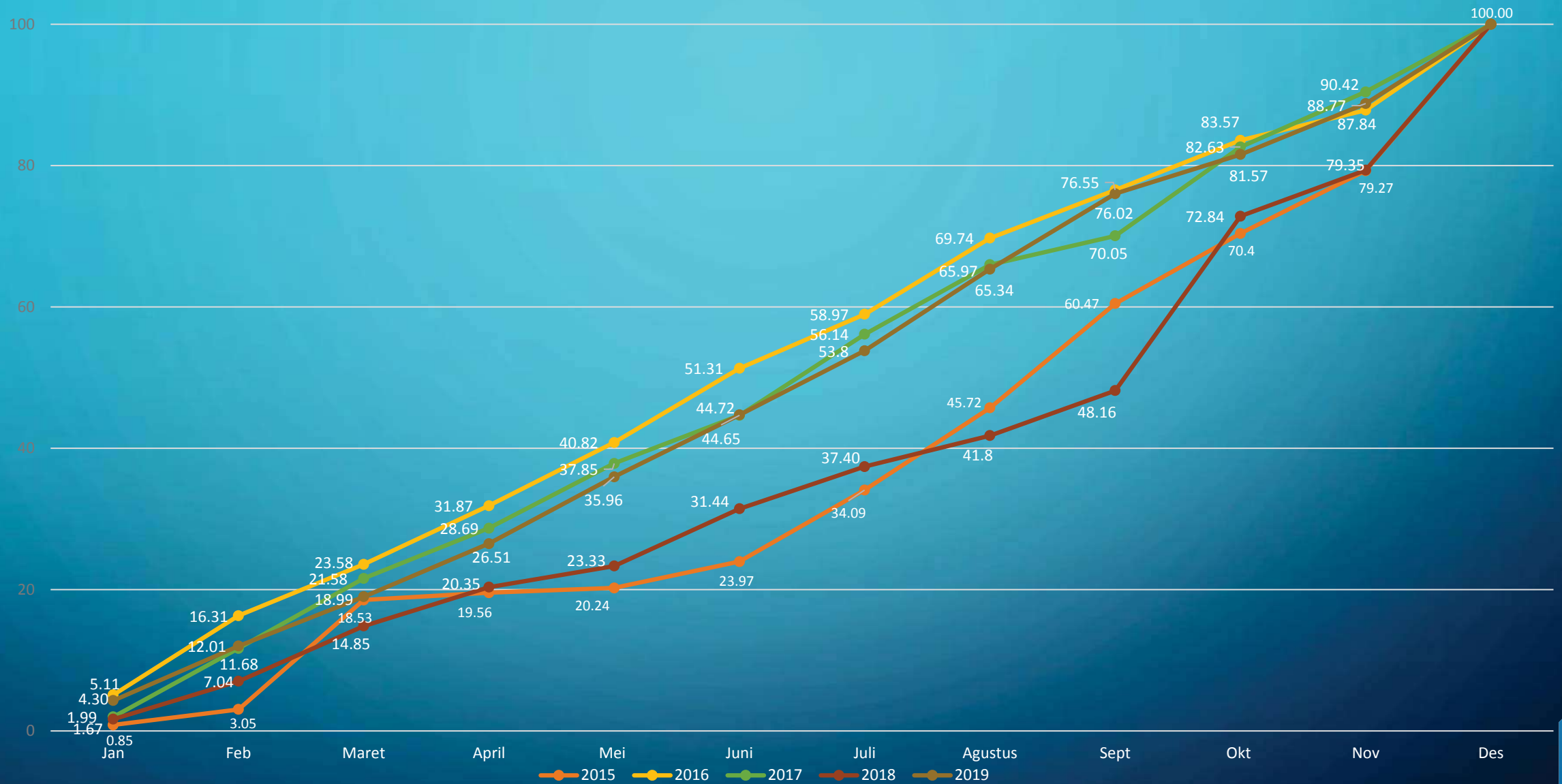
No	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah
		RM	PNBP		RM	PNBP		RM	PNBP		RM	PNBP		RM	PNBP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program dan Kerjasama	2,640,995	859,776	3,500,771	2,251,188	1,040,507	3,291,695	1,206,847	1,340,934	2,547,781	827,790	1,445,821	2,273,611	1,802,380	-	1,802,380
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	2,634,138	978,083	3,612,221	1,967,855	1,268,650	3,236,505	1,115,543	1,466,312	2,581,855	870,762	1,304,695	2,175,457	1,780,000	-	1,780,000
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	2,654,340	1,037,896	3,692,236	1,884,577	933,642	2,818,219	1,172,105	1,439,495	2,611,600	817,033	1,315,330	2,132,363	1,792,620	-	1,792,620
4	Keuangan dan Umum	39,160,010	1,192,379	40,352,389	22,163,478	978,100	23,141,578	19,988,489	704,017	20,692,506	25,535,282	990,602	26,525,884	22,276,790	-	22,276,790
Jumlah		47,089,483	4,068,134	51,157,617	28,267,098	4,220,899	32,487,997	23,482,984	4,950,758	28,433,742	28,050,867	5,056,448	33,107,315	27,651,790	-	27,651,790

Anggaran Sekretariat Badan P2SDM menurut jenis belanja terbagi menjadi tiga yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai adalah pengeluaran baik dalam bentuk uang atau barang terhadap pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja barang terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya.

Tabel 2.2 Anggaran Sekretariat Badan P2SDM Per Belanja (Dalam Rupiah)

No.	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		Jenis Belanja(dalam ribu rupiah)			Jenis Belanja			Jenis Belanja			Jenis Belanja			Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
1	Program dan Kerjasama	-	3,500,771	-	-	3,291,695	-	-	2,497,781	50,000	-	2,273,611	-	-	1,802,380	-
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	-	3,612,221	-	-	3,236,505	-	-	2,581,855	-	-	2,127,957	47,500	-	1,760,000	20,000
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	-	3,692,236	-	-	2,818,219	-	-	2,611,600	-	-	2,132,363	-	-	1,792,620	-
4	Keuangan dan Umum	33,627,958	4,773,931	1,950,500	18,060,537	4,884,483	196,558	15,718,839	4,663,972	309,695	21,368,568	4,409,766	747,550	17,344,266	4,806,524	126,000
Jumlah		33,627,958	15,579,159	1,950,500	18,060,537	14,230,902	196,558	15,718,839	12,355,208	359,695	21,368,568	10,943,697	795,050	17,344,266	10,161,524	146,000

Grafik 2.1 Tren Rencana Penarikan Anggaran Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019



Revisi Anggaran

Revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Sekretariat Badan P2SDM telah melakukan revisi anggaran dengan tingkat kewenangan Kanwil DJPb bagi internal Satker Sekretariat Badan P2SDM maupun memfasilitasi revisi anggaran tingkat kewenangan DJA bagi Satker lingkup BP2SDM.



Grafik 2.2 Jumlah Revisi Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017-2019



Kerjasama Badan P2SDM

Kerjasama di lingkup Badan P2SDM bertujuan untuk membangun hubungan kerja dengan mitra baik nasional (kerjasama dalam negeri) maupun internasional guna mendukung kegiatan peningkatan penyuluhan dan pengembangan SDM LHK.


Tabel 2.3 Daftar Kerjasama Dalam Negeri Lingkup Badan P2SDM 2015-2019

No	SATKER PELAKSANA	MITRA	JUDUL KERJASAMA/ RUANG LINGKUP	NOMOR MoU/NK	Nomor PKS	PERIODE
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Badan P2SDM	Kepala Badan Diklat	Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan		PKS.1/IX-Set/2014 dan 119-784 Tahun 2014	(2014-2019)
2	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mendikbud, Menristek, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup		PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016 Dan 99/VII/NK/2016, 11a/M/NK/2016, No.9 Tahun 2016 dan 660/2688A/SJ	(2016-2021)
3	Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM	Sekjen Kemendikbud, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristekdikti, Sekjen Kemenag, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemdagri	Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Pada Satuan Pendidikan		PKS.1/P2SDM/LATMAS/SDM.2/12/2017 Dan 113/XII/PKS/2017, 001/B/PKS/2017, 4 Tahun 2017, 193/9828/ Bangda	(2017-2021)
4	Rektor Institut Pertanian Stiper	Kepala Badan P2SDM KLHK	Pengembangan Sumber Daya Manusia	0170.E1.KS.2015 dan NK.02/P2SDM-Setbadan/2015		(2015-2020)
5	Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper	Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM KLHK	Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		No.064.FK.S.2015 dan PKS.7/renbang-2/2015	(2015-2020)
6	Kepala BP2SDM KLHK	Direktur Sekolah Vokasi UGM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekolah Vokasi	NK.01/P2SDM-Setbadan/2015 dan No.22/Dir/KS/SV/2015		(2015-2020)
7	Kepala Pusrenbang SDM KLHK	Direktur Sekolah Vokasi UGM	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekolah Vokasi		No.PKS.6/RENBANG-2/ 2015 dan No.24/Dir/KS/SV/2015	(2015-2020)
8	Kepala BP2SDM KLHK	Dekan Fakultas Hukum UGM	Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Litigasi		No.PKS.2/P2SDM/SET/KUM.3/9/2016 dan No. 3919/H.01.H4.FH/I/ 2016	(2016-2019)

No	SATKER PELAKSANA	MITRA	JUDUL KERJASAMA/ RUANG LINGKUP	NOMOR MoU/NK	Nomor PKS	PERIODE
1	2	3	4	5	6	7
9	Menteri LHK	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		PKS.4/MENLHK/P2SDM/KUM.3/8/2018	(2018-2023)
10	Badan P2SDM	Ditjen Dikdasmen, Kemendikbud dan Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, Kemendikbud	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		PKS.2/P2SDM/SET/KUM.3/12/2018, 618/D.D5/KS/2018, 29344/B.D/KS/2018	(2018-2023)
11	Menteri KLHK	Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Implementasi Perhutanan Sosial dan kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, Serta Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PKS.2/P2SDM/SET/KUM.3/12/2018, 618/D.D5/KS/2018, 29344/B.D/KS/2018	(2018-2021)
12	Menteri RISTEKDIKTI	Menteri LHK	Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		4/M/NK/2018 dan PKS.5/MENLHK/P2SDM/KUM.3/8/2018	(2018-2023)
13	Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Direktur jenderal Kelembagaan ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Pendidikan tinggi Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Penyelenggaraan program profesi Insinyur Bidang Kehutanan		PKS.01/P2SDM/SET/SET.0/9/2019	(2019-2024)
14	Sekretaris Badan P2SDM	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Peningkatan Pendidikan Bidang Kehutanan Bagi Putra Daerah Yang Berasal Dari Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri Samarinda		PKS.2/SET/PK/KUM.3/12/2019 421/2235/SETDA/KM-A	(2019-2020)
15	Badan P2SDM	Universitas Hasanuddin	Penyelenggaraan Program Profesi Insinyur Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		PKS.1/P2SDM/SET/SET.0/11/2018 dan 24770/UN4.1/KU.03.02/2018	(2018-2021)

Tabel 2.4 Daftar Kerjasama Luar Negeri Lingkup Badan P2SDM 2015-2019

No	Mitra Kerjasama	Ruang lingkup kerjasama	Bidang Kerjasama	Periode
1	FAO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan SDM KPH 2. Pembangunan kurikulum E-Learning berdasarkan hasil pemetaan 3. Pelaksanaan sekolah lapang bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan lebah madu 4. Persiapan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di KPH 	Peningkatan kapasitas SDM KPH dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat dari KPH dalam bentuk kegiatan pelatihan dan penyuluhan	2016 - 2018
2	Senior High School at Sakado, University Tsukuba, Japan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran Guru 2. Pertukaran Siswa 3. Kolaborasi penelitian dan pertemuan akademik 4. Pertukaran informasi, publikasi dan materi untuk pendidikan (Lokasi 5 SMK Kehutanan) 	Educational Exchanges and Cooperation	2013 - 2018
3	Ministry of Agriculture and Fisheries of The Democratic Republic of Timor-Leste	<ol style="list-style-type: none"> 1. Award of Extension and Human Resources Development ("EHRD") scholarships for Forestry Vocational High School in Indonesia 2. Training for Staff 		2016 - 2019
4	World Bank (Forest Investment Program)	Menyediakan juknis dan peningkatan kapasitas untuk percepatan operasionalisasi KPH, antara lain: menyusun kebijakan dan peraturan, mempersiapkan SOP, dan membangun system monev dan pelaporan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.	Peningkatan Kapasitas dalam operasionalisasi KPH	2016 - 2021
5	APFNet	Penunjukkan BP2SDM sebagai Focal Point APFNet	Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Kapasitas SDM	2016 - 2018
6	RI-Norway REDD+	Implementing Agency project Norway tentang Sekolah Lapang bagi Masyarakat Lokal dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Penyuluhan dalam mendukung pengurangan emisi dan deforestasi (REDD)	2017 - 2018

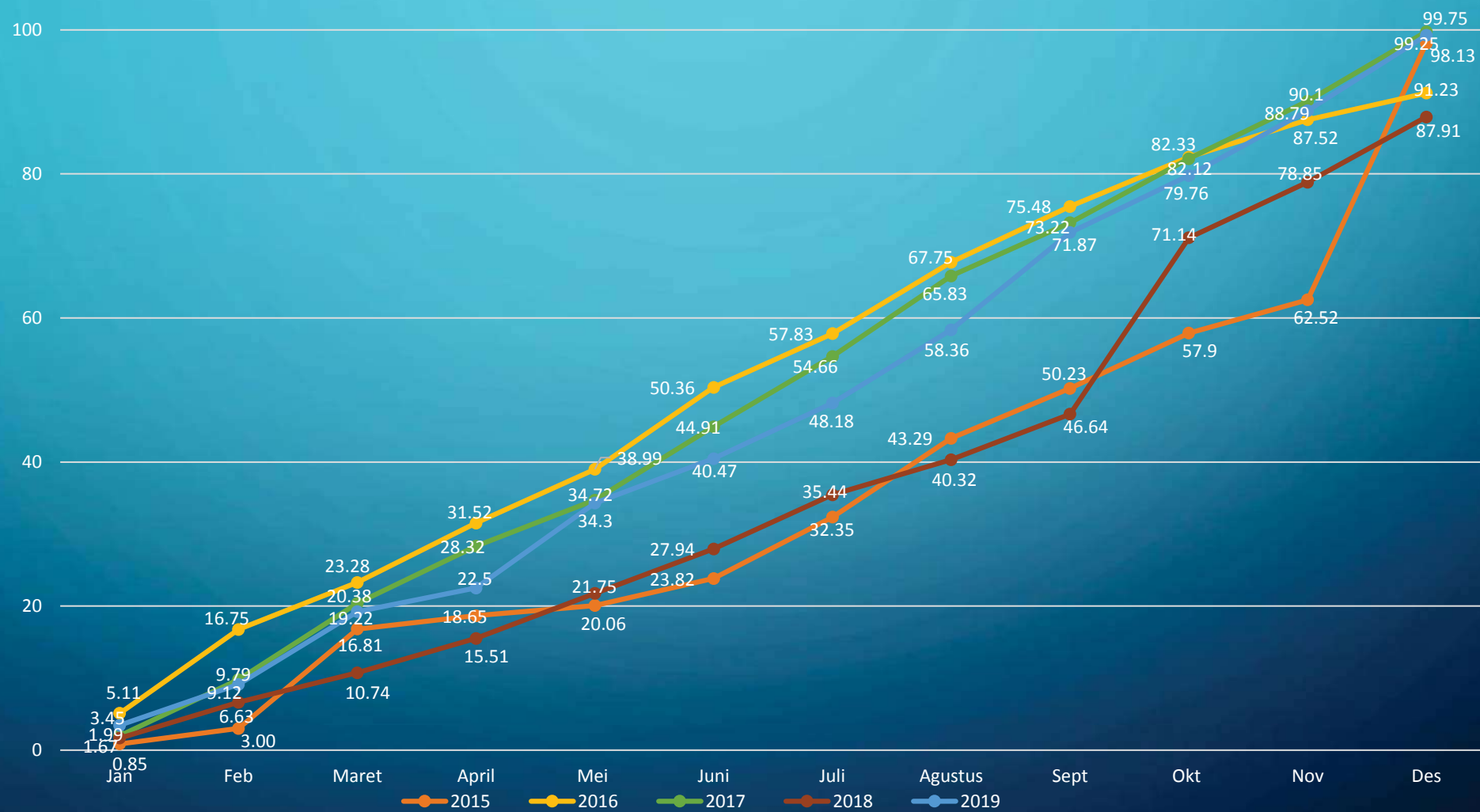


BAB III INFORMASI, PUBLIKASI DAN EVALUASI

Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi mempunyai tugas pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan publikasi serta evaluasi dan pelaporan rencana, program dan anggaran.

Data lingkup Bagian Informasi, Publikasi dan Evaluasi yang ditampilkan statistik ini meliputi Tren realisasi anggaran Sekretariat Badan P2SDM, Realisas anggaran per Sumberdana, realisasi anggaran per belanja, Evaluasi IKK Sekretariat Badan P2SDM, Publikasi Badan P2SDM pada Media Cetak, Publikasi Badan P2SDM pada media sosial, dan Kegiatan Pameran Badan P2SDM.

Grafik 3.1 Grafik Tren Realisasi Anggaran Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019



Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019 Per Sumber Dana

No	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah	Sumber Dana (dalam ribu rupiah)		Jumlah
		RM	PNBP		RM	PNBP		RM	PNBP		RM	PNBP		RM	PNBP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program dan Kerjasama	2,635,557	853,563	3,489,120	2,172,479	344,264	2,516,742	1,206,344	1,335,858	2,542,202	827,300	1,443,262	2,270,562	1,795,680	-	1,795,680
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	2,627,628	945,673	3,573,301	1,957,555	405,720	2,363,275	1,112,897	1,464,089	2,576,986	870,459	1,304,001	2,174,460	1,779,855	-	1,779,855
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	2,591,401	997,495	3,588,896	1,854,245	334,724	2,188,969	1,118,385	1,435,451	2,553,836	816,322	1,314,204	2,130,526	1,789,549	-	1,789,549
4	Keuangan dan Umum	38,360,010	1,066,130	39,426,140	22,153,229	416,293	22,569,522	19,985,714	703,973	20,689,687	21,550,034	987,070	22,537,104	22,080,660	-	22,080,660
Jumlah		46,212,646	3,864,813	50,077,459	28,137,508	1,501,001	29,638,509	23,423,340	4,939,371	28,362,711	24,064,115	5,048,537	29,112,652	27,445,745	-	27,445,745

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019 Per Belanja

No.	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		Jenis Belanja(dalam ribu rupiah)			Jenis Belanja			Jenis Belanja			Jenis Belanja			Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	12	13	14
1	Program dan Kerjasama	-	3,489,120	-	-	2,516,742	-	-	2,486,282	49,500	-	2,270,562	-	-	1,795,680	-
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	-	3,573,301	-	-	2,363,275	-	-	2,576,880	-	-	2,126,939	47,500	-	1,759,855	20,000
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	-	3,588,896	-	-	2,188,969	-	-	2,608,836	-	-	2,129,631	-	-	1,789,549	-
4	Keuangan dan Umum	33,222,337	4,453,727	1,750,076	17,972,546	4,400,911	196,065	15,678,988	4,653,605	308,619	17,397,754	4,400,096	740,169	17,201,182	4,753,925	125,553
Jumlah		33,222,337	15,105,044	1,750,076	17,972,546	11,469,897	196,065	15,678,988	12,325,603	358,119	17,397,754	10,927,228	787,669	17,201,182	10,161,524	145,553

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Sekretariat Badan P2SDM dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Badan P2SDM dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKK Sekretariat Badan P2SDM berdasarkan hasil penilaian SAKIP Badan P2SDM yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dengan target nilai SAKIP Badan P2SDM pada Tahun 2019 sebesar 84 poin (A). Pada tahun 2019 Badan P2SDM mendapatkan nilai 82,99 dengan predikat A (memuaskan). Nilai tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Badan P2SDM merupakan instansi yang memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel yang menjadi representasi ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan P2SDM

Tabel 3.3 Evaluasi IKK Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019

No	Indikator	2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Realisasi	Persen (%)	Target	Realisasi	Persen (%)	Target	Realisasi	Persen (%)	Target	Realisasi	Persen (%)	Target	Realisasi	Persen (%)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : "SAKIP dengan nilai minimal 84,00 (A) di Tahun 2019"	80	95,43	119,29	81	90,60	111,85	82	72,09	87,91	83	80,84	97,40	84	82,99	98,80

Publikasi Badan P2SDM

Badan P2SDM sebagai salah satu unit Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM serta menyebarkan informasi terkait hal tersebut kepada publik melalui media baik secara konvensional maupun media sosial. Tugas publikasi Badan P2SDM dilaksanakan oleh Sekretariat Badan P2SDM.

Publikasi yang dilakukan antara lain publikasi melalui media cetak, media sosial (instagram) dan media elektronik (website)

Tabel 3.4 Publikasi Badan P2SDM Pada Media Cetak Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nama / Jenis Media Cetak	Judul Materi/Artikel
1	2	3	4
1	2015	Agro Indonesia	1 Pasca UU No. 23 / 2014 Kementerian LHK Tawarkan Solusi
			2 Ketika Komando Penyuluh Ditarik Kembali Ke Pusat
			3 Membaca Keresahan Penyuluh
			4 Solusi Penyuluhan Pasca UU No. 23 / 2014
			5 UU Pemerintah Daerah Bikin Gaduh Penyuluh
			6 Pasca Terbitnya UU No. 23 / 2014 Banjir Dukungan Terhadap Penyuluh
			7 Pusdiklat SDM Kementerian LHK Godok Calon Pemimpin Profesional
			8 Pusrenbang SDM Kementerian LHK Persiapkan Bakti Rimbawan Untuk KPH
			9 Puslatmas dan PGL BP2SDM LHK Didik Generasi Muda Berwawasan Lingkungan
			10 Revolusi Mental PNS Kementerian LHK, Profesional, Kerja Terukur, Konsisten
			11 Lulusan SMK Kehutanan BP2SDM LHK, Laris Manis di Bursa Tenaga Kerja
			12 15 SMK Negeri/Swasta Buka Jurusan Kehutanan, BP2SDM Godok Kerja Siap Pakai
			13 Value Attack Untuk Revolusi Mental Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Suara Pembaharuan	14 Kementerian LHK Beri Penghargaan Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional
			15 Penyuluh adalah Ujung Tombak Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup

Tabel 3.5 Publikasi Badan P2SDM Pada Media Cetak Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nama / Jenis Media Cetak	Judul Materi/Artikel
1	2	3	4
2.	2016	Agro Indonesia	1 Penyuluhan Penting untuk Mewujudkan Nawacita
			2 ASN LHK Wajib Ikuti Pelatihan 100 Jam
			3 Kementerian LHK Butuh 16.000 Penyuluh
			4 Merekrut Tenaga Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat
			5 Siapkan Aparatur LHK Yang Berkompeten
			6 Setiap Hari Pelototi Serapan Anggaran
			7 Meningkatkan Mutu ASN Lingkup LHK
			8 100 Perusahaan HPH Berebut Lulusan SMK Kehutanan
			9 Menyelamatkan Lingkungan Sejak Dari Usia Dini
			10 Saatnya Kompetensi Jadi Acuan Suatu Jabatan
		Leaflet	11 Pengelolaan Lebah Madu Apis Dorsata
			12 Regevetasi Lahan Bekas Tambang Mineral Batuan (Galian C)
		Booklet	13 Teknik Budidaya Lebah Madu Trigona Sp
			14 Budidaya Ulat Sutera

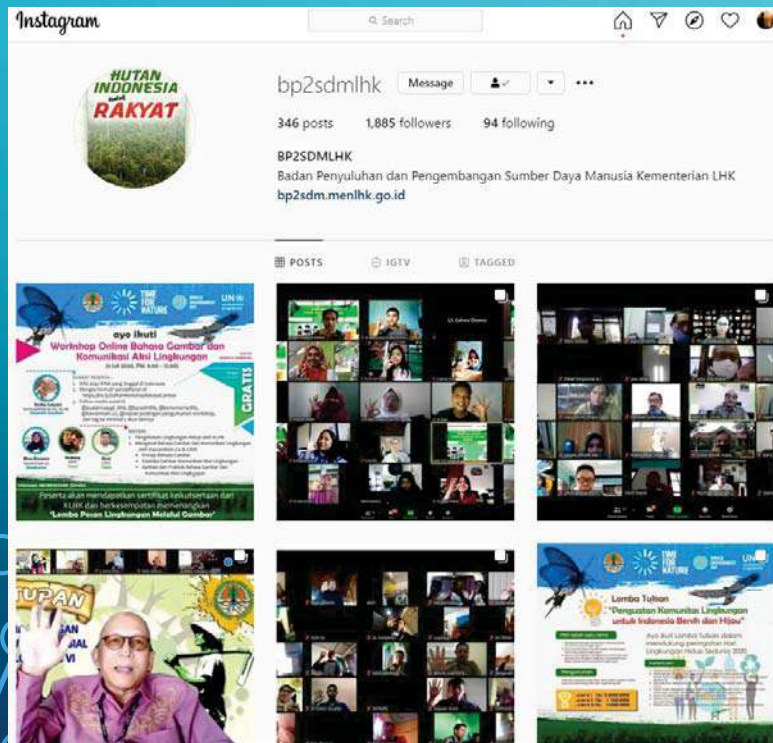
Tabel 3.6 Publikasi Badan P2SDM Pada Media Cetak Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nama / Jenis Media Cetak	Judul Materi/Artikel
1	2	3	4
3	2017	Agro Indonesia	1 Perusahaan HPH-HTI Wajib Punya Penyuluh
			2 Mempertahankan Akreditasi A Pusdiklat Kehutanan
			3 Agen Perubahan Berperan Tingkatkan Kinerja Aparatur KLHK Budaya Kerja Jangan Sebatas Jargon
			4 Kini Piala Adiwiyata Jadi Kebanggaan Sekolah
			5 Kerjasama 'G to G' Dalam Mencetak Tenaga Terampil Kehutanan
			6 Penyuluh Pendukung Perhutanan Sosial Mereformasi Kelompok Tani Hutan Melek Internet
			7 Standar Kompetensi Jamin Kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			8 Pramuka Berperan dalam Perbaikan LHK Indonesia
			9 Tinggi, Realisasi dan Serapan Anggaran BP2SDM
			10 Pusdiklat Kehutanan Siap Luncurkan e-learning "Keterbatasan Anggaran Munculkan Inovasi"
		Majalah Ekonomi Hijau	11 Memerankan Penyuluh untuk Meningkatkan Ekonomi Rakyat
		Leaflet	12 Kemitraan Kekuatan Mewujudkan Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera
			13 Pengembangan Wisata Alam pada Hutan Lindung oleh Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KT HKM)
		Booklet	14 Mengenal Perhutanan Sosial
			15 Pengusaha Bambu oleh Masyarakat

Tabel 3.7 Publikasi Badan P2SDM Pada Media Cetak Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nama / Jenis Media Cetak	Judul Materi/Artikel	
1	2	3	4	
4.	2018	Agro Indonesia	1 Memastikan Sukses Perhutanan Sosial	
			2 Penyuluh Itu Pioner dan Obor Penerangan	
			3 Kompetensi dan Rekam Jejak Syarat Mutlak Karir ASN LHK	
			4 Membentuk Generasi Muda Peduli Lingkungan	
			5 SDM Berkualitas dari Lembaga Diklat Terbaik di Indonesia	
			6 Bermitra Untuk Tingkatkan Kualitas SDM	
			Majalah Tropis	7 Penghargaan Lingkungan Adiwiyata : Mengedukasi Generasi Milenial Lebih Peduli Lingkungan
			Leaflet	8 Pola Agroforestri di Lahan Gambut
			Booklet	9 Panduan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Dalam Mendukung Perhutanan Sosial
				10 Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan
				11 Menabung di Bank Sampah
5.	2019	Agro Indonesia	1 Profesional Kehutanan Siap Kerja Lulusan SMKKN	
			2 Pelajar Jadi Agen Perubahan Pengelolaan Sampah Plastik	
			3 Juara Wana Lestari Teladan Pembangunan LHK	
			4 Membentuk Generasi Muda Peduli Lingkungan	

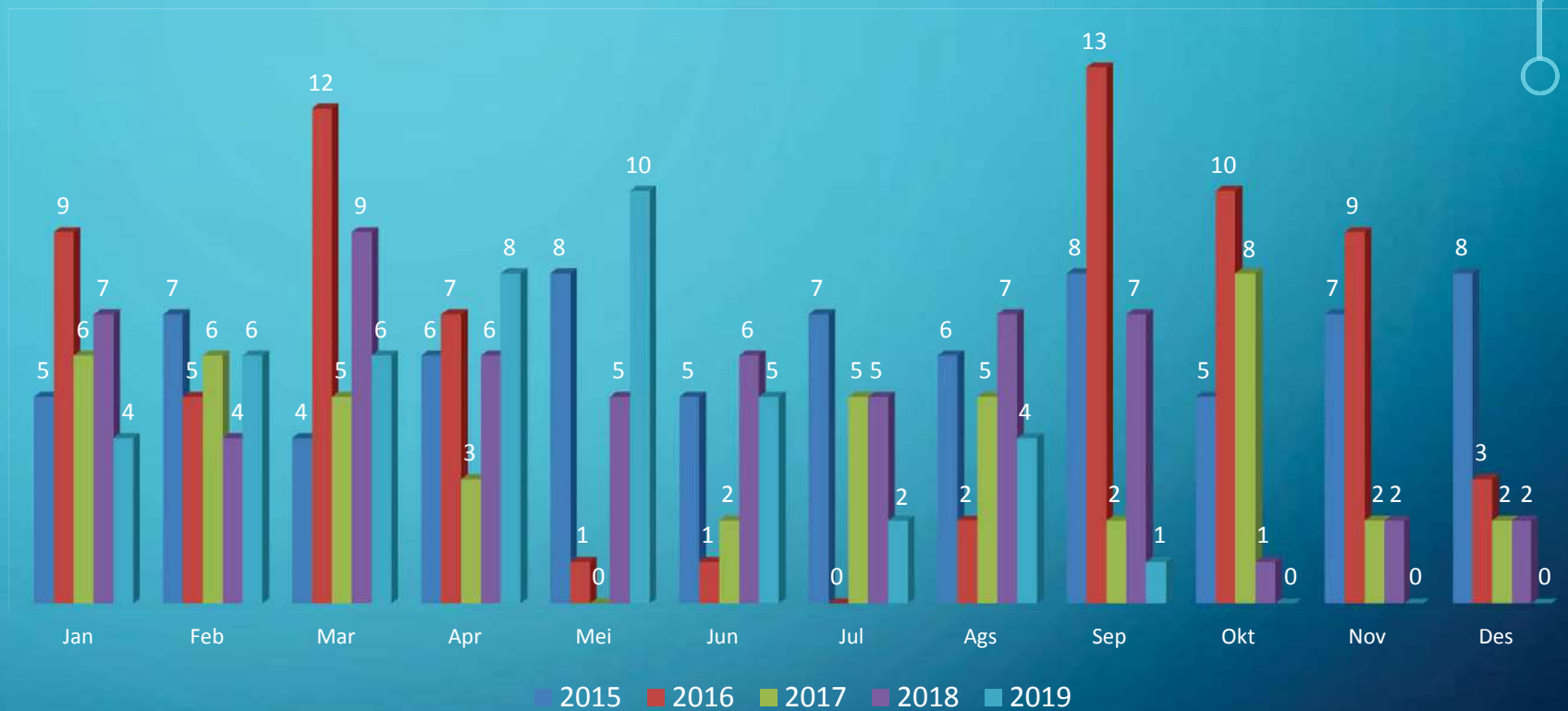
Akun media sosial instagram Badan P2SDM dengan alamat situs <https://www.instagram.com/bp2sdmlhk/> merupakan platform media sosial Badan P2SDM yang menyajikan dokumentasi foto dan video kegiatan lingkup Badan P2SDM guna menyebarluaskan informasi penyuluhan dan pengembangan SDM LHK kepada pengguna secara tepat dan aktual.



Grafik 3.2 Publikasi Badan P2SDM Pada Media Sosial Tahun 2017-2019



Publikasi kegiatan Badan P2SDM di website dapat dilihat melalui situs www.bp2sdm.menlhk.go.id. Jumlah publikasi kegiatan Badan P2SDM di website pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut



Grafik 3.3 Publikasi Badan P2SDM Pada Website Tahun 2015-2019

Tabel 3.8 Kegiatan Pameran Badan P2SDM Tahun 2015-2019


No	Tahun	Nama Pameran	Waktu	Lokasi
1	2	3	4	5
1	2015	1 7th Indogreen Environment & Forestry Expo	15 - 18 April 2015	Jakarta Convention Center
		2 Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (PKLI) ke 19	18 - 21 Juni 2015	Assembly Hall Jakarta Convention Center
		3 Job Fair and Expo	17 - 18 September 2015	Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo Gd. Manggala Wanabakti
		4 Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXV	17 - 20 Oktober 2015	Jakabaring Sport City Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
		5 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	5 - 8 November 2015	Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
2	2016	1 Indonesia Climate Change Education and Expo	14 - 17 April 2016	Hall B Jakarta Convention Center
		2 8th Indogreen Environment and Forestry expo	26 - 29 Mei 2016	Hall A Jakarta Convention Center
		3 Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (PKLI) ke 20	9 - 12 Juni 2016	Jakarta Conventer Center
		4 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	23 - 26 September 2016	Samarinda Convention Hall, Jl. Sempaja Sel. Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
		5 Hari Pangan Sedunia (HPS)	6 - 8 September 2016	Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.9 Kegiatan Pameran Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nama Pameran	Waktu	Lokasi
1	2	3	4	5
3	2017	1 9th Indogreen Environment & Forestry Expo	13 - 16 April 2017	Hall B Jakarta Convention Center
		2 Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (PKLI) ke 21	1 - 4 Juni 2017	Hall A Jakarta Convention Center
		3 Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke XV	3 - 6 Mei 2017	Hall A Stadion Harapan Bangsa Desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi NAD
		4 Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN)	11 - 13 Agustus 2017	Taman Blambangan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur
		5 Perhutanan Sosial Nusantara (PESONA)	6 - 8 September 2017	Auditorium Dr. Ir. Soedjarwo Gd. Manggala Wanabakti
4	2018	1 Hari Hutan Internasional Tahun 2018	18 - Maret 2018	Taman Menteng Jakarta
		2 Perempuan Pejuang Keadilan Gender Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam	28 Maret 2018	Auditorium Gd. Manggal Wanabakti
		3 10th Indogreen Environment and Forestry Expo (IEFE)	5 - 8 April 2018	Samarinda Convention Center, Samarinda Kalimantan Timur
		4 Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam	6 - 8 Juli 2018	Pelataran Siwa Candi Prambanan Yogyakarta
		5 Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke 22	19 - 21 Juli 2018	Jakarta Convention Center
		6 Hari Pangan Sedunia (HPS)	18 - 21 Oktober 2018	Banjarbaru, Kalimantan Selatan
		7 Soft Launching The Interim Secretariat International Tropical Peatland Center	30 Oktober 2018	Auditorium Gd. Manggal Wanabakti
		8 Public expose & public service exhibition Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2018	2 - 4 Desember 2018	Lapangan Ahmad Yani Kota Tangerang
		9 Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS)	28 - 29 Desember 2018	Persemaian Permanen Purwakarta

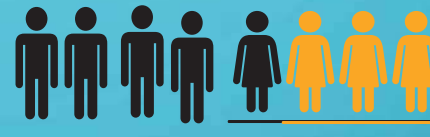
Tabel 4.0 Kegiatan Pameran Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Nama Pameran	Waktu	Lokasi
1	2	3	4	5
5	2019	1 Pameran Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2019	21 Maret 2019	Manggala Wanabakti Jakarta Pusat
		2 Pameran dalam rangka “11 th Indogreen Environment and Forestry Expo (IEFE)”	4 s/d 7 April 2019	Celebes Convention Center, Makassar Sulawesi Selatan
		3 Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke 23	11 s/d 13 Juli 2019	Jakarta Convention Center
		4 Pameran Hari Konservasi Alam Nasional 2019	5 s/d 8 Agustus 2019	TWA Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau
		5 Pameran Gelar Kebangsaan 2019	29-30 Agustus 2019	Auditorium Gd Manggala Wanabakti Jakarta
		6 Perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wana Bakti (Pertikawan) 19 s/d 23 November 2019		Bumi Perkemahan Cibubur
		7 Pameran dalam rangka Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS)	4 s/d 5 Desember 2019	Desa Oro Oro Ombo, Batu Jawa Timur



BAB IV
KEPEGAWAIAN, HUKUM,
ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Bagian Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan peraturan perundangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.



Grafik 4.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Berdasarkan Golongan Tahun 2015-2019

No.	BAGIAN	Golongan/Ruang (Orang)						TOTAL	
		IV		III		II			
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Program dan Kerjasama	2		3	5			5	5
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi		1	7	1	1	1	8	3
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	3	1	4	6	1	2	8	9
4	Keuangan dan Umum	6		5	5	3		14	5
Jumlah Tahun 2019		11	2	19	17	5	3	35	22
Jumlah Tahun 2018		12	2	22	16	5	3	39	21
Jumlah Tahun 2017		12	2	21	17	5	4	38	23
Jumlah Tahun 2016		8	1	24	19	7	3	39	23
Jumlah Tahun 2015		8	2	23	18	7	4	39	23



Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2019

No.	Bagian	Tingkat Pendidikan (Orang)										TOTAL	
		S-3		S-2		S-1		D-3		SLTA		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	5	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program dan Kerjasama	1		3	1	1	4			1		6	5
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi			2	1	3	1	3	1			8	3
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana			4	2	3	4	1	1		2	8	9
4	Keuangan dan Umum			5	1	4	2	1	2	3		13	5
Jumlah Tahun 2019		1		14	5	11	11	5	4	4	2	35	22
Jumlah Tahun 2018				18	5	12	10	4	4	5	2	39	21
Jumlah Tahun 2017				15	3	14	14	4	4	5	2	38	23
Jumlah Tahun 2016		2		11	2	15	16	5	3	6	2	39	23
Jumlah Tahun 2015		2		11	2	14	15	6	4	6	2	39	23

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2015-2019

No	BAGIAN	JENIS JABATAN (Orang)																		TOTAL	
		STRUKTURAL/ESELON								FUNGSIONAL UMUM		Pranata komputer		Analisis kepegawaian		Arsiparis		PERANCANG PERPU			
		I		II		III		IV		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program dan Kerjasama					1		2	1	3	4									6	5
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi						1	2	1	5	1	1								8	3
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana					1		2	1	2	4			2	3		1	1		8	9
4	Keuangan dan Umum	1		1		1		2	0	8	4						1			13	5
Jumlah Tahun 2019		1	0	1	0	3	1	8	3	18	13	1	0	2	3	0	2	1	0	35	22
Jumlah Tahun 2018		1	0	1	0	3	1	8	3	22	13	1	0	2	2	0	2	1	0	39	21
Jumlah Tahun 2017		1	0	1	0	3	1	9	2	20	16	1	0	2	3	0	1	1	0	38	23
Jumlah Tahun 2016		1	0	1	0	4	0	9	3	20	16	1	0	2	3	0	1	1	0	39	23
Jumlah Tahun 2015		1	0	1	0	4	0	8	4	22	15	1	0	1	3	0	1	1	0	39	23

Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Berdasarkan Umur Tahun 2015-2019

No.	Bagian	Umur – tahun (Orang) 2019												Jumlah	
		< 30		JMLH	30 - 40		JMLH	41 - 50		JMLH	> 50		JMLH		
		L	P		L	P		L	P		L	P			
1	2	3	4		5	6		7	8		9	10		11	12
1	Program dan Kerjasama		1	1	2	4	6	2		2	2		2	6	5
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	2	1	3	3	1	4	1		1	2	1	3	8	3
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	1	1	2	3	4	7	1	3	4	3	1	4	8	9
4	Keuangan dan Umum		1	1	4	4	8	3		3	6		6	13	5
Jumlah Tahun 2019		3	4	7	12	13	25	7	3	10	13	2	15	35	22
Jumlah Tahun 2018		5	3	8	11	14	25	7	2	9	16	2	18	39	21
Jumlah Tahun 2017		6	7	13	5	10	15	14	2	16	13	4	17	38	23
Jumlah Tahun 2016		7	6	13	8	10	18	11	4	15	13	3	16	39	23
Jumlah Tahun 2015		8	10	18	7	9	16	10	2	12	14	2	16	39	23

Tabel 4.5 Jumlah Mutasi Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

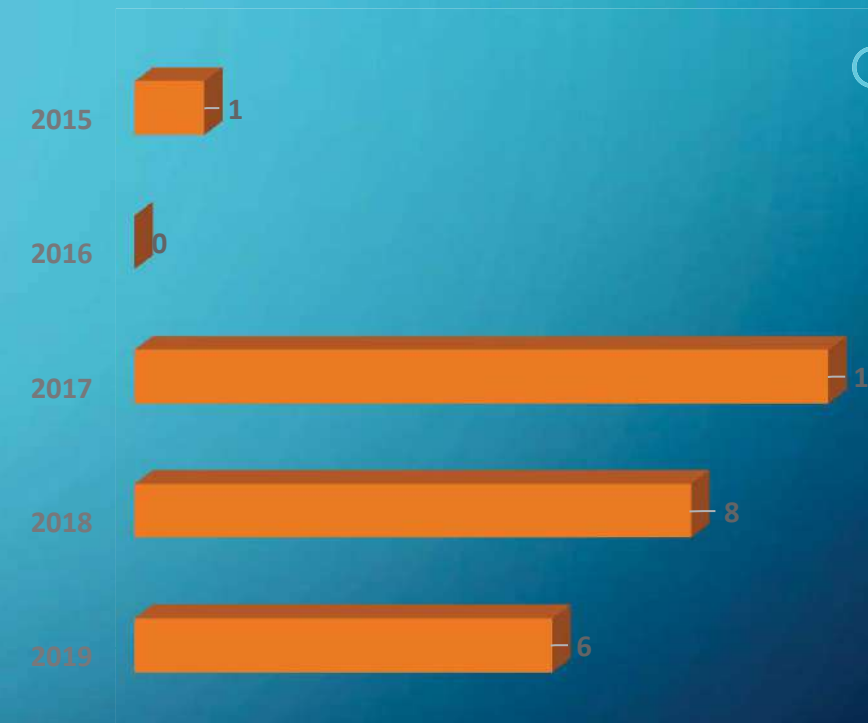
No.	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Program dan Kerjasama	1		1	1		1	1	1	2				1		1
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi				1		1				1		1	1	1	2
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	1	1	2	1		1				1		1			
4	Keuangan dan Umum	1		1	1		1	2		2	2		2	1		1
Jumlah		3	1	4	4		4	3	1	4	4		4	3	1	4

Tabel 4.6 Jumlah Pensiun Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No.	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Program dan Kerjasama										2		2			
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	1		1				2	1	3						
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana															
4	Keuangan dan Umum							1		1	2	1	3	2		2
Jumlah		1		1				3	1	4	4	1	5	2		

Grafik 4.7 Jumlah Pelanggaran Disiplin Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Jenis Sanksi	2018		2017		2016		2015		Total (Orang)
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sanksi Disiplin Ringan	5	2	5	5	-	-	-	-	17
2	Sanksi Disiplin Sedang	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	Sanksi Disiplin Berat	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Total (Orang)		5	3	5	5	-	-	1	-	19



Grafik 4.2 Jumlah Pelanggaran Disiplin Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

Tabel 4.8 Kenaikan Pangkat Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No.	Bagian	2015			2016			2017			2018			2019		
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	Program dan Kerjasama		1	1				2		2			1	2	4	6
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	1	2	3	1	1	2	1	1	2				3	1	4
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana		3	3				2	1	3	1	1	2	3		3
4	Keuangan dan Umum	3	1	4					1		6	4	10	3	3	6
	Jumlah	4	8	11	1	1	2	5	3	8	7	5	13	11	8	19

Tabel 4.9 Jumlah Pegawai Sekretariat Badan P2SDM Penerima Penghargaan Satyalancana Karyasatya Tahun 2015-2019

No.	Bagian	Satyalancana Karyasatya						Jumlah	
		X		XX		XXX		L	P
		L	P	L	P	L	P		
1	Program dan Kerjasama								
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi								
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana								
4	Keuangan dan Umum	1	1					1	1
Jumlah Tahun 2019		1	1					1	1
Jumlah Tahun 2018		3		2		4		9	
Jumlah Tahun 2017		4					1		
Jumlah Tahun 2016									
Jumlah Tahun 2015			1	1		1		2	1

Tabel 4.10 Jumlah Tenaga Kontrak Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No.	Bagian	2015				2016				2017				2018				2019				
		S-1		SMA		S-1		SMA		S-1		SMA		S-1		SMA		S-1		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Program dan Kerjasama		3	3			3	3			1	3	1		1	3	2		1	3	2	
2	Informasi, Publikasi, dan Evaluasi	1				1																
3	Kepegawaian, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana			3				3				3				3					3	
4	Keuangan dan Umum	2	2	3	1	2	2	3	1	1	2	7	1	2	2	7	1	2	2	7	1	
Jumlah		3	5	9	1	3	5	9	1	1	5	11	1	3	5	12	1	3	5	12	1	

Tabel 4.11 Peraturan Perundangan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Judul	Nomor Peraturan
2015		
1	Peraturan Menteri LHK tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.18/MENLHK-II/2015
2	Peraturan Menteri LHK tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya	P.36/MENLHK-II/2015
3	Peraturan Menteri LHK tentang Wanawiyata Widyakarya	P.61/MENLHK-SETJEN/2015
4	Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.15/MENLHK-II/2015
5	Peraturan Menteri LHK tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	P.17/MENLHK-II/2015
6	Peraturan Menteri LHK tentang Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	P.52/MENLHK-SETJEN/2015
7	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Uji Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	P.54/MENLHK-SETJEN/2015
8	Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan dalam Pembangunan Kehutanan	P.70/MENLHK-SETJEN/2015
9	Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.53/MENLHK-SETJEN/2015
10	Keputusan Menteri LHK tentang tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata	SK.422/MENLHK-SETJEN/2015
11	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan	P.1/IX-SET/2015
12	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Tata Cara Perhitungan Kelebihan Jam Pelajaran sebagai Dasar Pembayaran Honorarium bagi Widyaiswara lingkup BP2SDMK	P.1/IX-SET/2015
13	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan	P.3/IX-SET/2015

No	Judul	Nomor Peraturan
14	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan	P.4/P2SDM-SETBADAN/2015
15	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	SK.18/IX-SET/2015
16	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penempatan Penyuluh Kehutanan PNS Pusat di BP2SDMK dalam Wilayah Kerja	SK.15/IX-SET/2015
17	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.1/IX-SET/2015
18	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pembentukan Tim Asesor Uji Kompetensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.2/IX-SET/2015
19	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penetapan Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan Tahun 2015	SK.26/P2SDM-RENBANG/2015
20	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penetapan Pendamping Tenaga Magang Mahasiswa Bakti Rimbawan Tahun 2015	SK.27/P2SDM-RENBANG/2015
21	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pembentukan Lembaga Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.29/P2SDM-Setbadan/2015
22	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pembentukan lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.1/IX-SET/2015
23	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pembentukan Tim Asesor Uji Kompetensi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.2/IX-SET/2015
24	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pengawas Satuan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.19/IX-SET/2015

Tabel 4.12 Peraturan Perundangan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Judul	Nomor Peraturan
2016		
1	Peraturan Menteri LHK tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.16/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/ 2016
2	Peraturan Menteri LHK tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri	P.17/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/ 2016
3	Peraturan Menteri LHK tentang Kode Etik Revolusi Mental	P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2016
4	Peraturan Menteri LHK tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/ 2016
5	Peraturan Menteri LHK tentang Sarana dan Prasarana Penyuluhan	P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/ 2016
6	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba dan Apresiasi Wanalestari	P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/ 2016
7	Peraturan Menteri LHK tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan	P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/ 2016
8	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/ 2016
9	Peraturan Menteri LHK tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah	P.92/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016
10	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2016
11	Peraturan Menteri LHK tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal	P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2016
12	Peraturan Menteri LHK tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri	P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/ 2016
13	Keputusan Menteri LHK tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata	SK.336/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4 /2016

No	Judul	Nomor Peraturan
14	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pembagian Pelaksanaan Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Non Aparatur dan Pelatihan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.7/P2SDM/SET/KHOTL/OTL.2/2/2016
15	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang No P.9 P2SDM/SET/KUM.1//2016/ ttg Paket Keahlian pada SMKKN	P.12/P2SDM/SET/KUM.1/7/ 2016
16	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Pusat	P.14/P2SDM/SET/KUM.1/9/ 2016
17	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan UPT	P.15/P2SDM/SET/PEG.1/10/ 2016
18	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Prosedur Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.18/P2SDM/SET/OTL.0/12/ 2016
19	Keputusan Menteri LHK tentang Tim Penilai Adiwiyata Nasional Tahun 2016	SK.377/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5 /2016
20	Keputusan Menteri LHK tentang Tim Pakar Lomba Wana Lestari Tahun 2016	SK.566/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2016
21	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari	P.11/P2SDM/SET/KUM.1/5/ 2016
22	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Standar Kompetensi Tenaga Pendamping Kesatuan Pengelolaan Hutan	P.1/P2SDM-SETBADAN/2016
23	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru di SMKKN	P.3/P2SDM/SET/OTL.2/2/2016
24	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMKKN	P.4/P2SDM/SET/OTL.2/2/2016
25	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Paket Keahlian pada SMKKN	P.5/P2SDM/SET/OTL.2/2/2016

Tabel 4.13 Peraturan Perundangan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Judul	Nomor Peraturan
2016		
26	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pembinaan Peserta Didik pada SMKKN	P.6/P2SDM/SET/OTL.2/2/2016
27	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Teknis Penilaian Sekolah Adiwiyata Nasional	P.13/P2SDM/LATMAS/ KUM.2/8/2016
28	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penetapan Lagu Mars Penyuluh Kehutanan	SK.9/P2SDM/SET/KUM.1/5/ 2016
29	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penempatan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Wilayah Kerja	SK.8/P2SDM/SET/KUM.1/5/ 2016
30	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pembidangan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SK.7/P2SDM/SET/KUM.1/5/ 2016
31	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Penilai Tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2016	SK.11/P2SDM/SET/KUM.1/6/ 2016
32	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Panitia Penyelenggaraan Temu Karya Pemenang Lomba dan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2016	SK.12/P2SDM/SET/KUM.1/6/ 2016
33	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup	SK.17/P2SDM/SET/KUM.1/11 /2016
34	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Panitia Sarasehan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2016	SK. 18/P2SDM/SET/ KUM.1/12/2016
35	Surat Edaran Kepala Badan P2SDM tentang Akreditasi dan Registrasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)	SE.1/P2SDM/SET/SDM.1/12/ 2016
2017		
1	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Tugas Belajar PNS lingkup KLHK	P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/ 2017
2	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pendidikan Dengan Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017

No	Judul	Nomor Peraturan
3	Peraturan Menteri LHK tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil	P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2017
4	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.46/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2017
5	Peraturan Menteri LHK tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Administrator Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/20 17
6	Peraturan Menteri LHK tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pengawas Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/20 17
7	Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2014 tentang Bakti Rimbawan Dalam Pembangunan Kehutanan	P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/ 2017
8	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan	P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/ 2017
9	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis PNS Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup di Daerah	P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/ 2017
10	Peraturan Menteri LHK tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan	P.47/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/ 2017
11	Peraturan Menteri LHK tentang Standard dan Uji Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2017
12	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	P.55/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2017
13	Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen /Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	P.62/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017
14	Keputusan Menteri LHK tentang Nama Aula Pusdiklat SDM LHK	SK.223/MENLHK/SETJEN/ SET.1/5/2017

Tabel 4.14 Peraturan Perundangan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Judul	Nomor Peraturan
2017		
15	Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Pejabat Fungsional Widyaiswara sebagai Agen Perubahan Budaya Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.9/P2SDM/SET/SDM.1/3/ 2017
16	Keputusan Menteri LHK tentang Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional	SK.225/MENLHK/P2SDM/SDM.0/ 5/2017
17	Keputusan Menteri LHK tentang Penunjukan Penanggungjawab Program dan Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusi	SK.230/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/5/2017
18	Keputusan Menteri LHK tentang tentang Dewan Pertimbangan Adiwiyata	SK.224/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 5/2017
19	Keputusan Menteri LHK tentang tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.377/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2016 tentang Tim Penilai Adiwiyata Nasional Tahun 2017	SK.326/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 7/2017
20	Keputusan Menteri LHK tentang Pembentukan Tim Akreditasi Lembaga Pelaksana Diklat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.71/MENLHK/SETJEN/SET.0/2/ 2017
21	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.6/PSDM/SET/REN.2/5/2017
22	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.9/P2SDM/SET/KUM.1/5/2015 tentang Paket Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri	P.7/P2SDM/SET/KHOTL/ KUM.1/6/2017
23	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pos Peyuluhan Kehutanan Pedesaan	P.5/P2SDM/SET/KUM.1/4/ 2017
24	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/ 2017
25	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Lomba dan Apresiasi Wana Lestari	P.10/P2SDM/SET/KUM.1/7/ 2017

No	Judul	Nomor Peraturan
26	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.2/P2SDM-Setbadan/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bakti Rimbawan	P.8/P2SDM/SET/SDM.1/6/ 2017
27	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dukungan Bagi Lembaga Sertifikasi Profesi	P.4/P2SDM/SET/SDM.1/4/ 2017
28	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Lomba Pengendali Ekosistem Hutan Berprestasi	P.9/P2SDM/SET/KUM.1/6/ 2017
29	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi dan Unsur, Bobot, serta Komponen Penilaian Akeditasi Bagi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.1/P2SDM/SET/KUM.1/3/ 2017
30	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Presentasi Hasil Studi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.14/P2SDM/SET/PEG.1/12/ 2017
31	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.11/P2SDM/SET/DIK.2/9/ 2017
32	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penetapan Pejabat Fungsional Widyaswara Sebagai Agen Perubahan Budaya Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.9/P2SDM/SET/SDM.1/3/ 2017
33	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Penetapan Koordinator Unit Pelaksana Teknis Sebagai Agen Perubahan Budaya Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SK.12/P2SDM/SET/SDM.1/6/ 2017
34	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Verifikasi Administrasi Registrasi Lembaga Sertifikasi Profesi Penyusun Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan	SK.16/P2SDM/SET/SDM.1/7/ 2017
35	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Pemenang Lomba Ekosistem Hutan Berprestasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	SK. 18/P2SDM/SET/KUM.1/ 8/2017
36	Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.37/Menlhk/Setjen /Kum.1/4/2016 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan	P.62/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017

Tabel 4.15 Peraturan Perundangan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Judul	Nomor Peraturan
2018		
1	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan	P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018
2	Peraturan Menteri LHK tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018
3	Peraturan Menteri LHK tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air	P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2018
4	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air	P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2018
5	Peraturan Menteri LHK tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara	P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 2/2018
6	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Prosedur Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	P.3/P2SDM/SET/OTL.3/7/2018
7	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.1/P2SDM/SET/KUM.1/3/ 2018
8	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Peta Lintas Fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SK.8/P2SDM/SET/KUM.1/4/2018
9	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Teknis Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Percepatan Kegiatan Prioritas Nasional Perhutanan Sosial	SK.3/P2SDM/SET/SDM.0/1/ 2018
10	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Penyusun Konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Adiwiyata	SK.02/P2SDM/SET/KUM.1/1/ 2018

No	Judul	Nomor Peraturan
2019		
1	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4 /2019
2	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan	P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4 /2019
3	Peraturan Menteri LHK tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara	P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4 /2019
4	Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan	P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/ 2019
5	Peraturan Menteri LHK tentang Penghargaan Adiwiyata	P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9 /2019
6	Peraturan Menteri LHK tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9 /2019
7	Keputusan Menteri LHK tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.164/MENHUT-II/2005 tentang Penunjukan Sekaligus Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Cideres dan Mandapa Seluas 146,58 (Seratus Empat Puluh Enam dan Lima Puluh Delapan Perseratus) hektar di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Sawala-Mandapa	SK.446/MENLHK/SETJEN/PLA.0/ 7/2019
8	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala SMKKN	P.04/P2SDM/SET/KUM.1/9/2019
9	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang BP2SDM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan P2SDM Nomor P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.1/P2SDM/SET/KUM.1/2/2019
10	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Sistem Informasi Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan	P.2/P2SDM/SET/KUM.1/7/2019

Tabel 4.16 Peraturan Perundangan Badan P2SDM Tahun 2015-2019

No	Judul	Nomor Peraturan
2019		
11	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri	SK.14/P2SDM/SET/KUM.1/10/2019
12	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan P2SDM Nomor SK.22/P2SDM/SET/KUM.1/12/2018 tentang Penempatan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Wilayah Kerja	SK.12/P2SDM/SET/KUM.1/8/2019
13	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Penilai Rencana Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	SK.10/P2SDM/SET/KUM.1/7/2019
14	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Penelaah Dokumen Permohonan Penetapan dan Rencana Kerja Sama Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	SK.11/P2SDM/SET/KUM.1/7/2019
15	Keputusan Menteri LHK tentang Penyaluran Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020	SK.191/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2020
16	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Kehutanan Negeri	P.1/P2SDM/SET/DIK.4/1/2020
17	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	P.2/P2SDM/SET/KUM.1/2/2020
18	Peraturan Kepala Badan P2SDM tentang Pendidikan dan Pelatihan ASN dan Non ASN di Bidang LHK dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik	P.3/P2SDM/SET/OTL.0/4/2020
19	Surat Edaran Kepala Badan P2SDM tentang Penjelasan Tata Cara Penyaluran B Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020	SE.3/P2SDM/SET/OTL.0/4/2020
20	Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Tim Penyusun Konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Adiwiyata	SK.02/P2SDM/SET/KUM.1/1/ 2018



BAB V KEUANGAN DAN UMUM

Tabel 5.1 Jumlah Barang Milik Negara lingkup Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jeep	2	2	2	2	2
2	Sedan	2	2	1	2	2
3	Mini bus (penumpang 14 orang kebawah)	14	14	14	14	14
4	sepeda motor					
	Sekretariat Badan	9	9	9	8	8
	Kabupaten/Kota (Penyuluh Kehutanan)	315	315	183	135	135
5	mesin ketik manual portable(11-13 Inchi)	2	2	2	2	2
6	lemari besi/metal	19	19	21	22	22
7	lemari kayu	25	25	30	30	29
8	rak kayu	9	9	9	9	9
9	Brankas	5	5	5	5	5
10	kardex besi	11	11	12	13	13
11	lemari katalog	5	5	5	5	5
12	white board	3	3	2	2	2
13	alat penghacur kertas	4	4	2	2	2
14	mesin absensi	4	4	6	7	5
15	LCD Proyektor/infokus	10	10	10	10	9
16	meja kerja kayu	83	83	80	80	80
17	kursi besi/metal	17	17	53	53	53
18	kursi kayu	40	40	30	30	30
19	sice	4	4	8	8	8
20	meja makan kayu	1	1	1	1	1
21	kursi fibe blas/plastik	52	52	60	60	110
22	jam elektronik	3	3	3	3	3
23	lemari es	4	4	4	6	6
24	ac window	16	16	11	11	11
25	ac split	6	6	6	6	6

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
26	kipas angin	4	4	4	4	4
27	televisi	8	8	6	6	6
28	sound sytem	1	1	2	2	2
29	camera video	3	3	3	3	3
30	dispenser	6	6	7	12	12
31	karpets	3	3	3	2	2
32	gordyn/kray	3	3	3	3	3
33	DVD player	2	2	2	2	2
34	Voice Recoder	3	3	3	3	3
35	lensa kamera	1	1	1	1	1
36	alat pemanas processing (water heater)	2	2	2	2	2
37	layar film projektor	2	2	3	3	3
38	Pesawat telepon	5	5	4	4	5
39	facsimile	2	2	2	2	2
40	kamera udara	0	0	0	1	1
41	laptop	20	20	23	24	28

Tabel 5.2 Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Sekretariat Badan P2SDM 2015-2019

Bulan	2016		2017		2018		2019	
	Surat	Surat	Surat	Surat	Surat	Surat	Surat	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Januari	363	235	363	233	250	161	411	264
Februari	371	286	406	344	312	337	326	296
Maret	383	340	466	307	464	308	347	128
April	381	282	354	239	457	224	304	278
Mei	349	421	282	192	302	217	265	267
Juni	326	341	204	199	173	224	215	178
Juli	304	109	324	286	315	302	375	217
Agustus	432	285	352	327	302	299	432	295
September	348	205	278	312	295	326	348	210
Oktober	359	347	253	276	230	259	359	353
November	341	378	267	320	344	284	341	391
Desember	301	288	323	279	238	190	301	296
Jumlah	4258	3517	3872	3314	3682	3131	4024	3173

Tabel 5.3 Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Badan P2SDM 2016-2019

Bulan	Jumlah Surat							
	2016		2017		2018		2019	
	SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D	SPM	SP2D
Januari	16	9	10	4	11	7	14	8
Februari	14	15	29	32	46	44	47	44
Maret	28	30	41	38	39	41	50	55
April	19	19	40	41	55	53	62	53
Mei	29	27	41	43	74	75	83	92
Juni	30	31	52	50	55	47	40	32
Juli	22	23	53	51	63	58	72	76
Agustus	40	41	75	61	58	67	76	75
September	46	43	44	57	72	67	64	71
Oktober	36	35	51	45	54	57	64	67
November	56	44	65	57	102	101	62	41
Desember	73	84	88	106	90	98	78	98
Jumlah	409	401	585	589	719	715	712	712
	810		1174		1434		1424	

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Tabel 5.4 Progres Hibah Sepeda Motor Lingkup Sekretariat Badan P2SDM Tahun 2017-2019

No	Tahun Pengadaan	Jumlah (unit)	Progres Penyelesaian Proses Hibah (Telah diterbitkan SK Menteri LHK tentang Penghapusan BMN) Per Tahun			Total Selesai Proses Hibah	Sisa kendaraan bermotor roda dua yang belum proses hibah
			2017	2018	2019		
1	2011	200	109	16	30	155	45
2	2012	115	23	32	19	74	41

Pada Tahun 2011 dan 2012 terdapat kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk penyuluh kehutanan di daerah. Pada Tahun 2020 telah diterbitkan SK Menteri LHK tentang penghapusan BMN Tahun 2012 sebanyak **8 SK**, dan yang sedang diproses di Biro Hukum sebanyak **13 SK** sehingga jumlah kendaraan bermotor roda dua yang belum proses hibah sebanyak **65 unit**

**Tabel 5.5 Daftar Kendaraan roda 2 Penyuluh Kehutanan Tahun 2011 yang sudah selesai proses hibah
Satker BP2SDM**

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
1	Sumatera Utara : 2 Unit - Simalungun	2	B 6198 PRQ	SK.189/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
			B 6374 PRQ	SK.189/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
2	Riau : 2 Unit - Kampar	2	B 6200 PRQ	SK.195/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
			B 6199 PRQ	SK.195/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
3	Jambi : 2 Unit - Kota Sungai Penuh	2	B 6289 PRQ	SK.461/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
			B 6383 PRQ	SK.461/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
4	Sumatera Selatan : 4 Unit - Lahat	2	B 6246 PRQ	SK.4126/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/8/2015 Tanggal 29-08-2016
			B 6326 PRQ	SK.4126/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/8/2015 Tanggal 29-08-2016
	- Muara Enim	2	B 6329 PRQ	SK.4132/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
			B 6280 PRQ	SK.4132/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
5	Bengkulu : 4 Unit - Rejang Lebong	2	B 6250 PRQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11-10-2017
			B 6346 PRQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11-10-2017
	- Seluma	2	B 6314 PRQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11-10-2017
			B 6359 PRQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11-10-2017
6	Lampung : 6 Unit - Tanggamus	2	B 6195 PRQ	SK.506/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017
			B 6268 PRQ	SK.506/MenLHK-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017
	- Lampung Timur	2	B 6285 PRQ	SK.6645/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
			B 6284 PRQ	SK.6645/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
- Pesawaran	2	B 6196 PRQ	SK.194/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017	
		B 6350 PRQ	SK.194/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017	

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
7	Jawa Barat : 14 Unit - Garut - Tasikmalaya - Purwakarta - Kab. Bandung - Kab. Ciamis - Kab. Sukabumi	3	B 6279 PRQ	SK.3990/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 23-08-2016
			B 6193 PRQ	SK.3990/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 23-08-2016
			B 6358 PRQ	SK.3990/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 23-08-2016
		2	B 6275 PRQ	SK.192/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
			B 6204 PRQ	SK.192/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
		3	B 6252 PRQ	SK.458/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
			B 6355 PRQ	SK.458/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
		1	B 6237 PRQ	SK.458/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
			B 6239 PRQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2019 Tanggal 30-12-2019
		3	B 6362 PRQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2019 Tanggal 30-12-2019
B 6238 PRQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2019 Tanggal 30-12-2019			
B 6207 PRQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2019 Tanggal 30-12-2019			
2	B 6184 PRQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2019 Tanggal 30-12-2019		
	B 6206 PRQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2019 Tanggal 30-12-2019		
8	Jawa Tengah : 43 unit - Purworejo - Blora - Kebumen - Cilacap	2	B 6274 PRQ	SK.6450/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/11/2016 Tanggal 29-11-2016
			B 6324 PRQ	SK.6450/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/11/2016 Tanggal 29-11-2016
		2	B 6380 PRQ	SK.6614/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 15-12-2016
			B 6249 PRQ	SK.6614/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 15-12-2016
		2	B 6323 PRQ	SK.4161/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
			B 6365 PRQ	SK.4161/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
		3	B 6347 PRQ	SK.4134/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
			B 6372 PRQ	SK.4134/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
B 6343 PRQ	SK.4134/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016			

Tabel 5.5 Daftar Kendaraan roda 2 Penyuluh Kehutanan Tahun 2011 yang sudah selesai proses hibah Saker BP2SDM

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
	-Grobogan	2	B 6216 PRQ	SK.4159/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
			B 6373 PRQ	SK.4159/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
	-Brebes	2	B 6368 PRQ	SK.6615/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2015 Tanggal 15-12-2016
			B 6371 PRQ	SK.6615/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2015 Tanggal 15-12-2016
			B 6320 PRQ	SK.4160/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
	-Pekalongan	3	B 6215 PRQ	SK.4160/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
			B 6353 PRQ	SK.4160/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/9/2016 Tanggal 05-09-2016
	-Purbalingga	2	B 6369 PRQ	SK.6648/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
			B 6251 PRQ	SK.6648/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
	-Banjarnegara	2	B 6337 PRQ	SK.454/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
			B 6338 PRQ	SK.454/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
	-Pemalang	2	B 6327 PRQ	SK.448/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
			B 6325 PRQ	SK.448/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
	-Semarang	3	B 6331 PRQ	SK.465/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
			B 6283 PRQ	SK.465/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
			B 6244 PRQ	SK.465/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
	-Karang Anyar	2	B 6333 PRQ	SK.457/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 20-02-2017
			B 6354 PRQ	SK.457/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 20-02-2017
	-Kab. Banyumas	2	B 6315 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6352 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
	-Kab. Boyolali	3	B 6316 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6361 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6351 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
	-Kab.Sragen	3	B 6321 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6205 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6212 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
	-Kab. Temanggung	3	B 6364 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6223 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6218 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
	-Kab. Wonogiri	3	B 6210 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6366 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
	-Kab. Wonosobo	3	B 6217 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6370 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6282 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018
			B 6211 PRQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2017 Tanggal 10-07-2018

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
9	D.I.Yogyakarta : 4 Unit			
	- Gunung Kidul	2	B 6214 PRQ	SK.6649/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
			B 6188 PRQ	SK.6649/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
	- Sleman	2	B 6342 PRQ	SK.463/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
B 6187 PRQ			SK.463/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
10	Jawa Timur : 34 Unit			
	- Bondowoso	2	B 6296 PRQ	SK.190/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
			B 6297 PRQ	SK.190/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
	- Blitar	2	B 6229 PRQ	SK.191/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2017 Tanggal 26-01-2017
			B 6299 PRQ	SK.191/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2017 Tanggal 26-01-2017
	- Sumenep	2	B 6271 PRQ	SK.4131/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
			B 6291 PRQ	SK.4131/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
	- Nganjuk	2	B 6191 PRQ	SK.4129/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2017 Tanggal 29-08-2016
			B 6292 PRQ	SK.4129/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2017 Tanggal 29-08-2016
	- Sampang	2	B 6349 PRQ	SK.4133/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
			B 6263 PRQ	SK.4133/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2016 Tanggal 29-08-2016
	- Malang	2	B 6267 PRQ	SK.4191/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2017 Tanggal 07-09-2016
			B 6301 PRQ	SK.4191/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2017 Tanggal 07-09-2016
	- Bojonegoro	2	B 6255 PRQ	SK.464/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
B 6265 PRQ			SK.464/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
- Pamekasan	2	B 6381 PRQ	SK.453/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017	
		B 6270 PRQ	SK.453/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017	
- Probolinggo	2	B 6203 PRQ	SK.462/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
		B 6298 PRQ	SK.462/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	

Tabel 5.5 Daftar Kendaraan roda 2 Penyuluh Kehutanan Tahun 2011 yang sudah selesai proses hibah Saker BP2SDM

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
	- Kab. Banyuwangi	2	B 6231 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
			B 6230 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
	- Kab. Jombang	2	B 6286 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
			B 6382 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
	- Kab. Magetan	2	B 6194 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
			B 6300 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
	- Kab. Mojokerto	2	B 6192 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
			B 6310 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
	- Kab. Ngawi	3	B 6348 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
			B 6269 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019
B 6233 PRQ			SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019	
- Kab Pasuruan	2	B 6264 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019	
		B 6260 PRQ	SK.6735/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/8/2019 Tanggal 12 Agustus 2019	
11	Bali : 5 Unit			
- Gianyar	2	B 6287 PRQ	SK.98/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3//2017 Tanggal 19-01-2017	
		B 6340 PRQ	SK.98/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3//2017 Tanggal 19-01-2017	
- Buleleng	2	B 6307 PRQ	SK.5310/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019	
		B 6245 PRQ	SK.5310/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019	
- Tabanan	1	B 6376 PRQ	SK.5310/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019	
12	Kalimantan Selatan : 10 Unit			
- Balangan	2	B 6222 PRQ	SK.185/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017	
		B 6266 PRQ	SK.185/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017	
- Hulu Sungai Tengah	2	B 6232 PRQ	SK.449/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017	
		B 6221 PRQ	SK.449/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017	
- Kab. Tabalong	2	B 6219 PRQ	SK.8894/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019	
		B 6220 PRQ	SK.8894/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019	
- Kab Banjar	2	B 6225 PRQ	SK.8894/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019	
		B 6228 PRQ	SK.8894/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019	
- Kab. Tanah Laut	2	B 6227 PRQ	SK.8894/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019	
		B 6226 PRQ	SK.8894/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019	
13	Gorontalo : 2 Unit			
- Gorontalo Utara	2	B 6277 PRQ	SK.504/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017	
		B 6208 PRQ	SK.504/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017	

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
14	Sulawesi Selatan : 7 Unit			
	- Luwu	2	B 6317 PRQ	SK.503/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017
			B 6344 PRQ	SK.503/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017
	- Enrekang	3	B 6235 PRQ	SK.6616/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 15-12-2016
			B 6360 PRQ	SK.6616/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 15-12-2016
	- Soppeng	2	B 6209 PRQ	SK.6616/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 15-12-2016
			B 6345 PRQ	SK.459/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
B 6367 PRQ	SK.459/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017			
15	Nusa Tenggara Barat : 8 Unit			
	- Lombok Tengah	2	B 6313 PRQ	SK.452/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
			B 6257 PRQ	SK.452/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/2/2017 Tanggal 08-02-2017
	- Bima	2	B 6309 PRQ	SK.193/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
			B 6303 PRQ	SK.193/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/1/2017 Tanggal 26-01-2017
	- Lombok Utara	2	B 6254 PRQ	SK.6644/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
			B 6256 PRQ	SK.6644/Menlhk-Setjen/Roum/KAP.3/12/2016 Tanggal 16-12-2016
- Dompu	2	B 6262 PRQ	SK.466/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
		B 6302 PRQ	SK.466/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
16	Nusa Tenggara Timur : 6 Unit			
	- Sikka	2	B 6261 PRQ	SK.505/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017
			B 6288 PRQ	SK.505/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 13-02-2017
	- Timur Tengah	2	B 6377 PRQ	SK.456/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
			B 6305 PRQ	SK.456/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017
- Belu	2	B 6306 PRQ	SK.460/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
		B 6311 PRQ	SK.460/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/2/2017 Tanggal 10-02-2017	
17	Banten : 2 unit			
	- Kab. Pandeglang	2	B 6328 PRQ	SK.233/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/1/2019 Tanggal 21-01-2019
B 6330 PRQ			SK.233/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/1/2019 Tanggal 21-01-2019	
JUMLAH		155		

**Tabel 5.5 Daftar Kendaraan roda 2 Penyuluh Kehutanan Tahun 2012 yang sudah selesai proses hibah
Saiker BP2SDM**

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
1	Sumatera Barat : 3 Unit			
	- Kab. Lima Puluh Kota	2	B 6277 PTQ	SK.5207/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017
	- Kab. Solok	1	B 6303 PTQ	SK.5207/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017
2	Bengkulu : 5 Unit			
	- Kab. Bengkulu Tengah	3	B 6262 PTQ	SK.5207/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017
			B 6297 PTQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017
			B 6296 PTQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017
	- Kab. Bengkulu Selatan	2	B 6246 PTQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017
B 6348 PTQ			SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017	
3	Sumatera Selatan : 10 Unit			
	- Kab. OKU Selatan	3	B 6311 PTQ	SK.5238/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 11 Oktober 2017
			B 6315 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6269 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
	- Kab. Musi Banyuasin	7	B 6409 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6336 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6408 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6334 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6407 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6299 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
			B 6330 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017
	B 6349 PTQ	SK.5302/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 12 Oktober 2017		
	4	Bali : 6 Unit		
- Kab. Bangli		2	B 6293 PTQ	SK.5200/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
			B 6286 PTQ	SK.5200/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
- Kab. Buleleng		2	B 6289 PTQ	SK.5200/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
			B 6346 PTQ	SK.5200/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
- Kab. Jembrana		1	B 6287 PTQ	SK.5200/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2017 Tanggal 9 Oktober 2017
- Kab. Buleleng	1	B 6344 PTQ	SK.5310/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2019 Tanggal 31 Mei 2019	
5	Maluku Utara : 10 Unit			
	- Kab. Halmahera Barat	2	B 6291 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
			B 6288 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
	- Kota Ternate	2	B 6285 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
			B 6250 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
	- Kab. Halmahera Timur	2	B 6322 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
			B 6310 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
	- Kab. Kepulauan Sula	2	B 6304 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
			B 6247 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
	- Kota Tidore Kepulauan	2	B 6335 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
			B 6284 PTQ	SK.1116/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/3/2018 tanggal 13 Maret 2018
6	Jawa Timur : 8 Unit			
	- Kab. Trenggalek	2	B 6332 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
			B 6352 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
	- Kab. Lamongan	2	B 6267 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
			B 6326 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
	- Kab. Pacitan	2	B 6283 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
			B 6279 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
	- Kab. Madiun	2	B 6276 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
			B 6321 PTQ	SK.1814/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 16 April 2018
	7	Nusa Tenggara Timur : 2 Unit		
- Kab. Nagakeo		2	B 6271 PTQ	SK.2400/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 25 April 2018
			B 6327 PTQ	SK.2400/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/4/2018 tanggal 25 April 2018
8	Sulawesi Tenggara : 8 Unit			
	- Kab. Konawe	2	B 6343 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
			B 6260 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
	- Kab. Konawe Utara	2	B 6345 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
			B 6312 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
	- Kab. Bombana	2	B 6342 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
			B 6331 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
	- Kab. Konawe Selatan	2	B 6340 PTQ	SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018
B 6305 PTQ			SK.2883/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 11 Mei 2018	

Tabel 5.5 Daftar Kendaraan roda 2 Penyuluh Kehutanan Tahun 2012 yang sudah selesai proses hibah Satker BP2SDM

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH UNIT	KETERANGAN	NOMOR SK
9	Jawa Tengah : 4 Unit			
	- Kab. Tegal	2	B 6351 PTQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2018 tanggal 10 Juli 2018
			B 6252 PTQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2018 tanggal 10 Juli 2018
	- Kab. Kendal	2	B 6248 PTQ	SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2018 tanggal 10 Juli 2018
B 6323 PTQ			SK.4711/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/7/2018 tanggal 10 Juli 2018	
10	Sulawesi Tengah : 7 Unit			
	- Kab. Morowali	1	B 6308 PTQ	SK.5109/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 28 Mei 2019
	- Kab. Banggai	2	B 6329 PTQ	SK.5109/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 28 Mei 2019
			B 6264 PTQ	SK.5109/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 28 Mei 2019
	- Kab. Buol	2	B 6309 PTQ	SK.5109/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 28 Mei 2019
			B 6278 PTQ	SK.5109/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 28 Mei 2019
- Kab. Tojo Una-Una	2	B 6338 PTQ	SK.5109/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/5/2018 tanggal 28 Mei 2019	
11	Jambi : 5 Unit			
	- Kab. Tebo	3	B 6258 PTQ	SK.8994/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019
			B 6313 PTQ	SK.8994/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019
			B 6320 PTQ	SK.8994/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019
	- Kab. Bungo	2	B 6298 PTQ	SK.8994/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019
B 6242 PTQ			SK.8994/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/10/2019 tanggal 21 Oktober 2019	
12	Jawa Barat : 4 Unit			
	- Kab. Kuningan	2	B 6350 PTQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2019 tanggal 30 Desember 2019
			B 6292 PTQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2019 tanggal 30 Desember 2019
	- Kab. Majalengka	2	B 6270 PTQ	SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2019 tanggal 30 Desember 2019
B 6249 PTQ			SK.10572/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/12/2019 tanggal 30 Desember 2019	
13	Kalimantan Tengah : 2 Unit			
	- Kab. Kapuas	2	B 6307 PTQ	SK.9658/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/11/2019 tanggal 18 November 2019
B 6241 PTQ			SK.9658/Menlhk-Setjen/Roum/Kap.3/11/2019 tanggal 18 November 2019	
JUMLAH		74		